FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN

Zainudin Hasan¹, Deni Septiawan², Gamaliel Partogian Pakpahan³, Ivan Kumara Putra
Atmanegara⁴, Rendi Setiawan⁵

zainudinhasan@ubl.ac.id¹, deny65578@gmail.com², pakpahangamaliel23@gmail.com³,
ivanputra762@gmail.com⁴, rendisetiawan4390@gmail.com⁵

Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masih belum efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data dari data sekunder. Data sekunder berupa dokumen, literatur, buku-buku, majalah maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab tindak pidana terjadinya perempuan sebagai korban adanya kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, faktor budaya, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

Kata Kunci : KDRT, Perempuan, Kekerasan, Korban.

ABSTRACT

Violence does not look at gender, but it is very clear from the data presented that violence against women is very worrying. Conflict that does not end can lead to Domestic Violence (KDRT). The rate of domestic violence tends to increase every year, indicating that victims are starting to realize that acts of domestic violence are not something that can be normalized, so that victims have the right to fight for their right to live safely and better. Legal protection for victims of domestic violence that occurs in society is still not effective. The aim of this research is to determine the factors that cause criminal acts of domestic violence with women as victims. This research uses a literature study approach. Data collection from secondary data. Secondary data takes the form of documents, literature, books, magazines and statutory regulations, especially those related to the issues discussed. The presentation of qualitative data is presented in the form of narrative text. Based on research results, the factors that cause criminal acts in women as victims of domestic violence are more often caused by economic factors, low knowledge, understanding and awareness of gender equality and justice, inappropriate interpretation/interpretation of religious teachings, violence as a tool to resolving conflicts,

cultural factors, violence as a tool to resolve conflicts and lack of opportunities for women in the legal process. One of the handling efforts is to fulfill the rights of women who are victims of domestic violence. Understanding the culture of equality is very much needed in the lives of couples, families and society. With facts, data and regulations in existing and established laws, the government and anti-violence against women institutions should be able to move more flexibly to help and protect women victims of violence.

Keywords : Domestic Violence, Women, Violence, Victims.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan berumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami istri, dan anak-anak dalam kehidupannya, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menjadi malapetaka apabila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.

Konflik sangat rentan terjadi di dalam sebuah keluarga, munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Namun apabila masalah diselesaikan secara emosi dan tidak sehat maka akan berujung pada kekerasan dan perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT.

Faktor-faktor penyebab kejadiannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di sebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa faktor pertama rasa malu, faktor kedua aib bagi keluarga, faktor ketiga tidak adanya kesetaraan gender, faktor keempat rasa takut, faktor kelima kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya. Hal ini sejalan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) bahwa banyaknya jenis KDRT terhadap perempuan yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis KDRT Tahun 2020

Jenis KDRT/ Relasi Personal	Jumlah Kasus KDRT/Relasi Personal
Kekerasan Terhadap Istri	3.221 (50%)
Kekerasan Dalam Pacaran	1.309 (20%)
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	954 (15%)
Kekerasan Mantan Pacar	401 (6%)
Kekerasan Mantan Suami	127 (2%)
Kekerasan Lainnya di Ranah Personal	457 (7%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021.

Berdasarkan tabel 1 di atas merupakan sebuah fakta bahwa banyaknya jenis KDRT/Relasi Personal terhadap perempuan yang menandakan semakin banyak perempuan yang menjadi korban KDRT. Fokus kali ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang sudah menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitar lingkungan korban. Data di atas merupakan bentuk sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum tercatat oleh lembaga- lembaga yang menaungi kasus kekerasan. Maka pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan sebagai tindak pidana hukum.

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah oleh Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remedium. Posisi pidana sebagai ultimum remedium artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan. Demikian halnya dengan posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai ultimum remedium dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini bisa menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi sosial. Apabila sanksisanksi ini tidak mempan, maka

alternatif terahir adalah dengan menggunakan sanksi pidana yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut

Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam untuk yaitu:

- a) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif Gender.

Selain pemerintah mempunyai kewajiban penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, juga masyarakat mempunyai peran dan kewajiban dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU KDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya:

- a) Mencegah kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Memberikan perlindungan kepada korban;
- c) Memberikan pertolongan darurat; dan
- d) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Ketentuan tentang pemberian kuasa oleh korban kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yang menentukan bahwa “korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”. Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan diatur dalam Pasal 27 yang menentukan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 285, 286, 288, 294, dan 351 sampai dengan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Tercantum

dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Perempuan Sebagai Korban.”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Studi pustaka menjadi metode pengumpulan data dengan pencarian informasi melalui buku, koran, dan literatur lain yang bertujuan untuk menyusun teori. Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap prosedur. Pertama, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis studi kasus yang ingin dilakukan yaitu faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan sebagai korban. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain, data digital atau internet, dan literatur lainnya. Berikutnya, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya. Kemudian, peneliti mendeskripsikan informasi dengan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Terakhir, penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, data yang telah diteliti dan dimaknai dalam bentuk kata-kata atau kalimat dalam mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan untuk mengambil hasil dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan emosional. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun emosional karena orang lain bertindak dengan cara-cara yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri atau orang lain di atas kepentingan dan hak-hak mereka yang dirugikan. Korban adalah individu atau sekelompok individu yang telah dirugikan oleh suatu tindakan kriminal atau kelalaian, seperti penyalahgunaan kekuasaan, baik secara fisik, emosional, finansial, atau dengan secara substansial mengganggu hak-hak dasar mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah suatu hal yang asing beberapa tahun belakangan ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini mengamanatkan: Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus; a). memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b). membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap

korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 undang-undang ini, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk; a). Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, b). Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, c). Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif, d). Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang ini pada hakekatnya merespon dan mengakomodir kebutuhan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, namun dia juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat non fisik, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap dirinya. Pemberian rasa aman di sini dilakukan pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Jadi, lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban.

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *modus vivendi* (kesepakatan mulia) pembentukan negara Indonesia di Alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah “melindungi keseluruhan”. Bangsa Indonesia”, hal ini telah memberikan jembatan menuju eksistensi yang holistik dan perlindungan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab negara bersama dengan unsur negara yang melekat di dalamnya. Maka secara substansi negara dibentuk untuk bebas dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun secara psikologis bagi seluruh rakyat dan masyarakat yang menjadi perantara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali terjadi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan orang-orang yang mengancam sebagian anggotanya masyarakat, yang dalam hukum dikenal dengan tindak pidana. Saat ini, tidak hanya tingkat kejahatan atau kuantitas kejahatan semakin meningkat namun jenis kejahatan atau kualitasnya pun berkembang pesat di Indonesia. Sanksi pidana dipandang sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah ini. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warga negaranya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan negara yang menurut JJ Rosseau berbasis masyarakat perjanjian. Selanjutnya masyarakat sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mulia (*modus vivendi*) yang dituangkan dalam suatu undang-undang dasar yang berupa undang-undang dasar negara.

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah oleh Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remedium.

Unsur-unsur kejahatan, seperti yang didefinisikan oleh Moeljatno, terbagi dalam dua kategori, dan kedua unsur tersebut saling berkaitan.

- a. Subyektif berkaitan dengan pelaku sebagai individu dan mencakup pikiran dan perasaan terdalamnya.
- b. Obyektif adalah faktor-faktor yang bersifat intrinsik pada karakter pelaku atau terkait dengan konteks di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasandalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi perempuan

Menurut penelitian Zainudin Hasan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di dalam maupun diluar rumah. Imbas dari kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada terjadinya kekerasan lainnya, seperti terhadap anak atau anggota keluarga lainnya. Berikut beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Faktor ekonomi menjadi puncak seringnya terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disebabkan kepala rumah tangga merasa bahwa kemampuan menafkahi isterinya dirasa cukup sedangkan isteri memiliki perspektif bahwa nafkah yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat, memposisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali laki-laki.
- c. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
- d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh

Adapun pendapat lain dari penelitian Cindra Ningsih Kohongia yang menyatakan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa disebabkan oleh adanya hubungan kekuasaan yang timpang antara suami dan istri. Budaya patriarki menempatkan laki-laki atau suami pada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan atau istri, sehingga sering kali

perempuan dianggap sebagai harta milik suaminya telah menikah. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami mempunyai kekuasaan lebih atas istrinya dibandingkan istrinya sendiri. Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

a. Ketergantungan ekonomi.

Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dari masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri harusnya benar-benar bergantung pada suaminya. Fenomena ini sering terjadi membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga kapan kekerasan dalam rumah tangga terjadi istri harus bertahan hidup. Perilaku seperti ini juga membuat Suami merasa dirinya lebih berkuasa atas ketidakberdayaan istrinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi berhubungan dengan kekerasan, disebabkan sebagian besar perempuan menggantungkan ekonominya kepada suaminya sedangkan kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki pekerjaan dan bekerja serabutan sehingga suami sendiri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang memicu destabilisasi emosi antara suami-istri sehingga menimbulkan tindak kekerasan baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti tindak pemukulan dan tindak kekerasan lainnya

b. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Kekerasan terhadap istri biasanya terjadi terhadap pihak tersebut dilatarbelakangi ketidaksesuaian antara harapan suami dengan kenyataan. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa harus memasang bertarung karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu basis budaya dalam masyarakat bahwa jika seorang wanita atau istri tidak patuh, maka mereka harus diperlakukan dengan kasar agar dia menjadi patuh.

c. Persaingan

Pada dasarnya kehidupan manusia itu penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah pula seperti halnya sepasang suami istri. Akibatnya terjadi persaingan antara suami dan istri kesenjangan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam bidang pendidikan, sosial hubungan, dominasi ekonomi, kondisi kerja dan masyarakat dapat menyebabkan persaingan yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Budaya juga melahirkan pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak mengherankan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri terjadi hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

d. Frustrasi.

Kekerasan juga bisa terjadi karena kelelahan psikologis yang menyebabkan frustrasi pada diri sendiri dan kurangnya kemampuan suami dalam mengatasi stres. Frustrasi muncul karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan suami. Ini biasa terjadi bagi pasangan yang belum siap menikah, suami yang belum mempunyai pekerjaan dan tetap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan kebebasannya masih sangat terbatas. Dalam hal ini, suami biasanya mencari pelarian dari mabuk-mabukan dan tindakan negatif lainnya yang berakibat berupa kekerasan terhadap isterinya, baik secara fisik, seksual, secara psikologis, atau bahkan ditinggalkannya keluarga

e. Kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum.

Dalam proses pengadilan, ada sangat banyak sedikit kesempatan bagi istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Ini juga bisa terjadi dilihat dari belum adanya KUHAP yang membahas hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisinya hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Ini penting karena laporan korban kepada

aparatus penegak hukum tidak dapat dianggap kejahatan tetapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.

Menurut Bonaparte ada beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/ suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama. Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal, misalnya menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya; menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga; korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum; penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sangat dibutuhkan pemahaman budaya kesetaraan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Pemahaman budaya kesetaraan setidaknya dapat membuat khususnya para laki-laki tidak lagi harus bersusah payah memenuhi ekspektasi budaya patriarki yang dimana menempatkan laki-laki harus selalu di atas perempuan. Padahal dengan budaya kesetaraan, laki-laki dan perempuan dapat saling menemukan titik kemampuan dalam pemenuhan keinginan sesuai dengan kapasitas diri masing-masing tanpa harus merasa bahwa diri laki-laki rendah ketika perempuan yang justru melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan yang mempengaruhi faktor tindak pidana tersebut meliputi faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, faktor budaya, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum.

4. Upaya Penanganan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial, polisi, pengadilan, atau pihak lain yang ada saksi kejahatan. Baik bersifat sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran tersendiri mengenai fungsi hukum itu sendiri yang memberikan suatu konsep dimana hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan kedamaian. Pemerintah masih berupaya memperbaiki sistem hukum agar lebih gender responsif, dengan mengeluarkan peraturan hukum, salah satunya dengan menerbitkan berbagai peraturan hukum peraturan bagi saksi dan korban atau untuk kepentingan perempuan. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari rumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “semua warga negara”, “setiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang mana menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan baik berdasarkan suku, agama, kepercayaan, politik, maupun gender. Penanganannya upaya tersebut adalah pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT. Pada Bab IV pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat lima hal yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 dan 14 sebagai berikut:

Pasal 13 berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan
- b. khusus di kantor kepolisian;
- c. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- d. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban; dan
- e. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa bahwa faktor penyebab tindak pidana terjadinya perempuan sebagai korban adanya kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di sebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, faktor budaya, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang- Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber Hukum Lain

Alimi, et. al. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, Hal: 20 – 27

Arianus Harefa. 2021. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan. Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, h. 18

- Badriyah, Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal.1.
- Dian Ekawaty Ismail and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. 2021. "Criminology Analysis of Women's as Perpetrators of Domestic Violence Crimes," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 57–76., 58 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. 2020. "Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA." <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. 2020. "Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA."
- Komnas Perempuan. 2021. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*.
- N. M. Alhasni, M. R., Badu, L. W., & Nggilu. 2019. Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 110–23.
- Ramdan Kasim, "Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (*Overspanning van Het Strafrecht*)," *Jambura Law Review*. 2, No. 1 (2020): 1–29., 3
- Zainudin Hasan dkk, (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*: *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2 (2), 103
- Zainudin Hasan dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di Lampung selatan*: *jurnal hukum malahayati* 3 (1), 1-18, 2022.
- Zainudin Hasan. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*. *PRANATA HUKUM* Volume 13 Nomor 2 Juli 2018.